PEMERINTAH KOTA MALANG

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2020 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan analisis capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu Laporan ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut, melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai narasumber yang kompeten. Mudah-mudahan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada tahun-tahun berikutnya.

Malang, Februari 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP.19730425 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

RINGKASAN EKSEKUTIF v

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Gambaran Umum 1

B. Isu-Isu Strategis 6

BAB II. PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA 9

A. Perencanaan Kinerja 9

B. Indikator Kinerja Utama 12

C. Perjanjian Kinerja 12

D. Standar Penilaian 14

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 15

A. Capaian Kinerja Organisasi 15

B. Realisasi Anggaran 32

BAB IV. PENUTUP 36

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Penilaian Capaian Sasaran Dinas Tenaga Kerja , Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020	vi
Tabel 2	Ikhtisar Capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja , Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020	vi
Tabel 2.1.	Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2018-2023	10
Tabel 2.2.	Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2018-2023	12
Tabel 3.1.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	16
Tabel 3.2.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023	18
Tabel 3.3.	Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	20
Tabel 3.4.	Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya	21
Tabel 3.5.	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)	23
Tabel 3.6.	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020	25
Tabel 3.7.	Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan	26
Tabel 3.8.	Realisasi Anggaran Tahun 2020	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023
Lampiran 2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang berfungsi sebagai media dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan. Keberhasilan di dalam memberikan pelayanan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dan dukungan serta partisipasi masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, Laporan kinerja ini juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat mengintepretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Berdasarkan hasil pengukuran atas rencana kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang tahun 2020 menunjukkan bahwa capaian kinerja dari 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan secara umum tercapai dengan kurang berhasil dengan rata-rata capaian sebesar 80,34%. Adapun pencapaian sasaran ini didukung oleh kebijakan yang terangkum dalam 8 program 39 kegiatan. Adapun hasil pengukuran dapat dijelaskan berikut ini :

Tabel 1
Hasil Penilaian Capaian Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

Rentang Capaian (%)	Pencapaian	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil	-	-
90 ≤ x < 110	Tercapai/ Berhasil	4	4
60 ≤ x < 90	Cukup tercapai/ Cukup berhasil	1	1
x < 60	Tidak tercapai/ Tidak berhasil	1	1

Secara umum kategori tercapai/berhasil atau tidak tercapai ini disumbangkan oleh kinerja atas program dan kegiatan Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas permasalahan yang terjadi, sehingga diketahui penyebab munculnya permasalahan atau hambatan dalam pencapaian kinerja.

Adapun kinerja pencapaian sasaran di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2
Ikhtisar Capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KETERANGAN
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	65	64,36	99,01%	
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,7 %	0,00%	0%	

Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	93,50%	90,39%	96,67%	
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	3	2,67	89%	
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	88.5	85,09	96,14%	
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,75	82,76	103,31%	

Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang ada beberapa indikator sasaran yang tidak tercapai dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran, perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam pencapaian kinerja, dimana dalam hal ini tertuang dalam program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Perizinan. Oleh karena itu, pada perencanaan strategisnya Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang pada tahun 2020 merencanakan sebanyak 8 program dan 39 kegiatan yang telah terealisasi sebanyak 8 program dan 38 kegiatan.

Seluruh capaian kinerja utama tersebut di atas tentu dihasilkan dengan dukungan Sumber Daya Manusia dan Anggaran. Dalam tahun 2020, telah dipergunakan anggaran dan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

1. Realisasi penggunaan dana adalah senilai Rp.5,607,402,018.00 dari anggaran sebesar Rp.6,013,879,219.00 atau mencapai 93,24 %
2. Realisasi pemanfaatan sumber daya manusia adalah sebesar 66 orang per bulan Desember 2020.

Pelaporan akuntabilitas kinerja ini selain menjadi media evaluasi, juga menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, hal terpenting dari laporan ini

adalah menggali pelajaran untuk pembenahan kedepan. Menyadari hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang telah mempersiapkan strategi-strategi pembenahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan dapat diminimalisir.

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan, maka diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi yang disajikan melalui keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*". Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Walikota.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan di dalam program kegiatan Tahun Anggaran 2020 serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Daerah Kota Malang 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
e. Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
f. Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
g. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
h. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Maksud dan tujuan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang tahun 2020.

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2020 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

3. Kelembagaan

a. Pembentukan Organisasi

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Malang 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

b. Kedudukan Organisasi

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

c. Struktur Organisasi

Dasar pembentukan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 67 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PTSP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PTSP

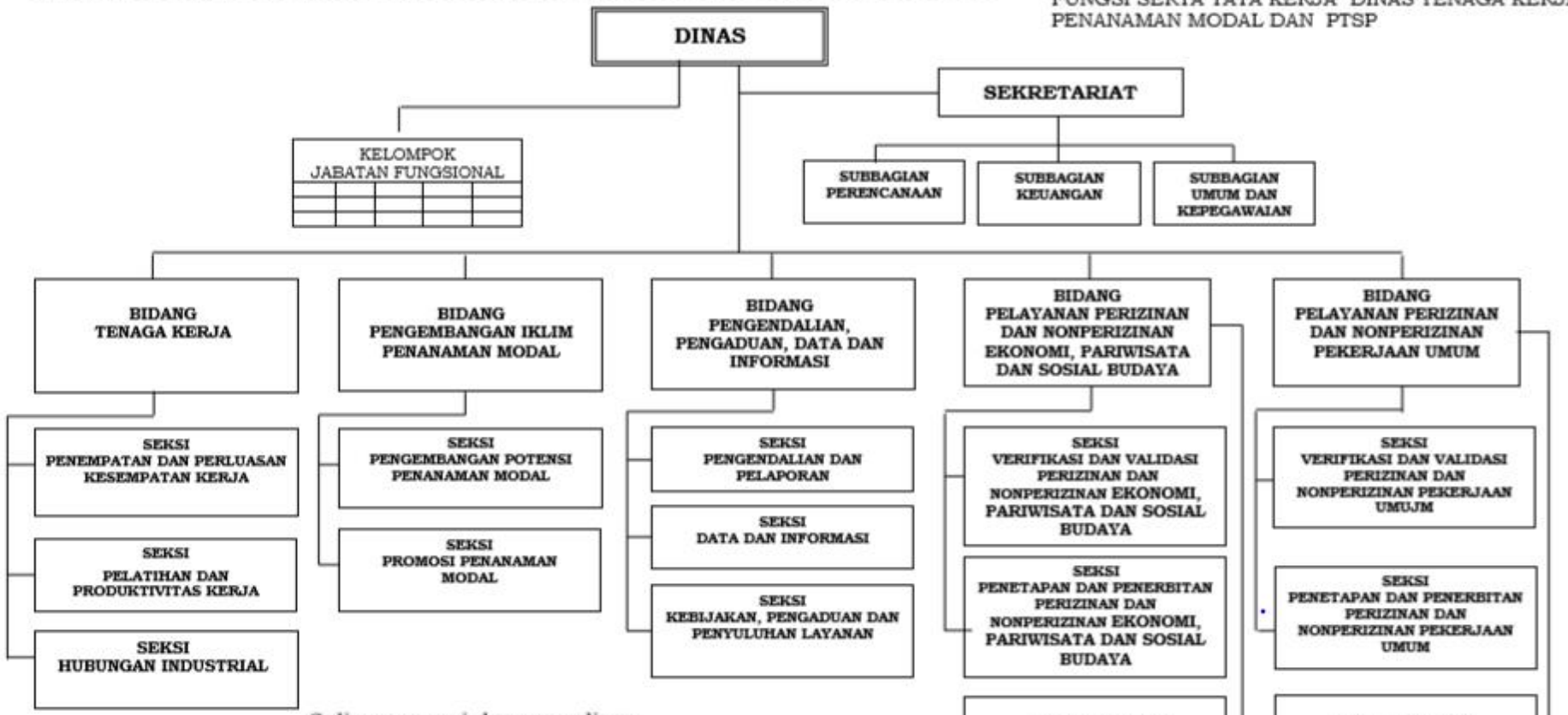

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

(1) Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. pelayanan perizinan dan nonperizinan;
c. pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan;
d. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
e. pembinaan bidang ketenagakerjaan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
f. pemberian konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil;
g. pengukuran produktivitas tenaga kerja;
h. pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja;
i. koordinasi perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pra dan purna penempatan;
j. koordinasi pengawasan tenaga kerja asing;
k. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah;
l. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah;

m. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal;
n. penyusunan peta potensi investasi;
o. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
p. fasilitasi kemitraan pelaku usaha kecil, menengah, dan besar;
q. pengendalian pelaksanaan tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
r. pengelolaan data dan informasi tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan yang terintegrasi;
s. pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
t. pengembangan sistem informasi dan pengolahan data tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
u. pelaksanaan penanganan pengaduan dan informasi tenaga kerja, penananman modal, dan perizinan;
v. pengawasan dan/atau penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan perizinan;
w. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
x. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
y. pelaksanaan administrasi di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
z. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

B. ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang tidak terlepas dari permasalahan yang selama ini muncul. Beberapa isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka pengangguran, yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal serta pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja;
2. Rendahnya kualitas dan kompetensi SDM pencari kerja;
3. Kurang relevansinya program pelatihan kerja dengan kebutuhan industri sehingga terjadi ketimpangan antara kebutuhan industri/perusahaan dengan kompetensi angkatan kerja;
4. Belum optimalnya kondisi ketenagakerjaan, ditandai oleh hubungan industrial yang masih rentan akibat kurang harmonisnya hubungan antara pengusaha dan pekerja;
5. Terbatasnya perlindungan tenaga kerja yang ditandai dengan masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan.
6. Kemudahan dalam pengurusan perizinan baik izin usaha dan penanaman modal. Selaras dengan program pemerintah untuk meningkatkan kemudahan investasi melalui berbagai kebijakan perizinan berusaha, dimana kemudahan berusaha berpengaruh terhadap minat pelaku usaha untuk melakukan investasi di Kota Malang.
7. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
   a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan pada DisnakerPMPTSP dengan ditambahkannya kewenangan pelayanan perizinan dan Non perizinan dari 56 Izin menjadi 129 perizinan dan Non Perizinan;
   b. Komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota malang untuk melaksanakan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
8. Iklim Investasi

   Kota Malang sebagai Kota yang berkembang secara pesat memiliki potensi investasi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan mempunyai nilai jual yang strategis untuk meningkatkan sektor perekonomian berbasis ekonomi kreatif, melalui :

   a. Optimalisasi pemetaan potensi investasi;

b. Optimalisasi promosi dan kerjasama kemitraan di bidang investasi;
c. Optimalisasi layanan perizinan dan non perizinan;
d. Optimalisasi data perizinan, non perizinan penanaman modal.

9. Kualitas Pelayanan Publik.

DisnakerPMPTSP berusaha mewujudkan kualitas pelayanan yang berfokus pada masyarakat, yang diimplementasikan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta Sistem Layanan yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Penyelenggaraan Pemerintahan perlu diadakan suatu rumusan perencanaan kinerja baik perencanaan strategis maupun rencana kerja tahunan yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis dan rencana kerja instansi pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan kegiatan, program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2023.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang pada akhir periode renstra adalah “Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel.”

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu ditentukan sasaran yang akan dicapai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang pendek. Di dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, terdapat sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang kompeten dan Nilai Penanaman Modal
2. Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
3. Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
5. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra
Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perijinan dan non perijinan yang akuntabel		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		65.94					72	
			Predikat WBK							75	
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	38,73	63,91	63,91	65	67	70	73	73
			Persentase peningkatan nilai investasi daerah			3,6 %	3,7 %	3,8 %	3,9 %	4,0 %	4,0 %
		Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja		93,21 %	93,21 %	93,50 %	93,80 %	94,10 %	94,40 %	94,40 %
		Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik			2.5	3	3.5	3.8	4.5	4.5
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan		87	85	88.5	88.8	89	89	89
		Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	79,66	81,65	81,65	81,75	81,76	81,80	81,85	81,85

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Adapun strategi adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Pelaksanaan Pelatihan Kerja yang mempunyai daya saing untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
b. Meningkatkan perluasan Kesempatan Kerja dan kualitas perlindungan sosial bagi pekerja;
c. Meningkatkan kualitas layanan perizinan IMB;
d. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
e. Menyusun aplikasi layanan yang berbasis elektronik dan berintegrasi dengan OPD lainnya.

Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
b. Meningkatkan Jumlah Penempatan Tenaga Kerja dan hubungan industrial yang harmonis
c. Menyusun Standar Pelayanan dan SOP pelayanan ketenagakerjaan, penanaman modal serta perizinan dan non perizinan dengan melibatkan pengguna layanan dan stakeholder terkait.
d. Menindaklanjuti layanan pemenuhan komitmen bagi pelaku usaha yang telah memiliki NIB serta dan masukan dari masyarakat.
e. Pengembangan Aplikasi Layanan Disnaker, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbasis elektronik
f. Menyusun rekomendasi kebijakan insentif termasuk kriteria, prosedur, kewajiban dan monitoring.
g. Melakukan sosialisasi pemanfaatan kemitraan kepada dunia usaha.
h. Pengembangan strategi promosi investasi Kota Malang yang lebih efisien dan efektif

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/234/35.73.122/2019 tentang Penetapan Indikator Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023.

Adapun IKU Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.

Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2018-2023

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perijinan dan non perijinan yang akuntabel	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja					72
		Predikat WBK					75
1.1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	63,91	65	67	70	73
		Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,6 %	3,7 %	3,8 %	3,9 %	4,0 %
1.2	Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	93,21%	93,50%	93,80%	94,10%	94,40%
1.3	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	2.5	3	3.5	3.8	4.5
1.4	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	85	88.5	88.8	89	89
1.5	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,65	81,75	81,76	81,80	81,85

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan

tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2020 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2020 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel.

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	65	1. Program peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. 2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial dibidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas.	69,040,800 24,348,059
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,7 %	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	784,315,000
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	93,50%	1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial.	161,100,000
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	3	1. Program Pengendalian, Data dan Informasi	446,855,000
Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	88.5	1. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi,	140,000,000

perizinan dan non perizinan			Pariwisata dan Sosial Budaya. 2. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum	1,556,494,800
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,75	1. Program Pelayanan Kesekretariatan	2,831,725,560

D. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
90 ≤ x < 110	Tercapai/ Berhasil
60 ≤ x < 90	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
x < 60	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja yang diuraikan pada bab ini menyajikan penjelasan tentang pencapaian sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Pengukuran capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Kota Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya, sehingga diketahui selisih kinerjanya (performance gap). Berdasarkan performance gap tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses pengukuran kinerja tersebut, diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat, efisiensi dan efektivitas.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Kompeten dan Nilai Penanaman Modal
- Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
- Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2020 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KETERANGAN
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	65	64,36	99,01%	
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,7 %	0,00%	0%	
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	93,50%	90,39%	96,67%	
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	3	2,67	89%	
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	88.5	85,09	96,14%	
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,75	82,76	101,23%	
Rata-rata keberhasilan				**80,34%**	

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 80,34%** pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Pada sasaran " Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal", diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

1. Target rasio daya serap tenaga kerja sebesar 65, realisasi sebesar 64,36, capaian 99,01% dengan kategori "berhasil". Formulasi perhitungan adalah *Jumlah pekerja/buruh pada perusahaan swasta/PMDN?PMA dibagi jumlah perusahaan swasta/PMDN/PMA dikali 100%*. Adapun jumlah pekerja/buruh tahun 2020 sebesar 62.879 orang, sedangkan jumlah perusahan swasta/PMDN/PMA tahun 2020 sebesar 977 perusahan.

2. Target persentase peningkatan nilai investasi daerah sebesar 3,7%, realisasi peningkatan nilai investasi 0% sehingga capaian 0,00% dengan kategori "tidak berhasil". Formulasi perhitungan adalah *Jumlah nilai investasi tahun berjalan dikurangi Jumlah nilai investasi tahun sebelumnya dibagi Jumlah nilai investasi tahun sebelumnya dikali 100%*. Adapun jumlah nilai investasi tahun 2020 sebesar 270.018.419.778 sedangkan nilai investasi tahun 2019 sebesar 139.694.274.101.129.

Pada sasaran "Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif", dengan indikator kinerja Rasio penduduk yang bekerja ditetapkan target sebesar 93,50%, realisasi sebesar 90,39%, capaian 96,67% dengan kategori "berhasil". Formulasi perhitungan adalah *Jumlah penduduk yang bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%*. Adapun jumlah penduduk yang bekerja adalah 425.368, sedangkan jumlah angkatan kerja adalah 470.610.

Sedangkan Pada sasaran "Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik", dengan indikator kinerja Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik ditetapkan target sebesar 3 realisasi sebesar 2,67 capaian 89% dengan kategori "cukup berhasil".

Kemudian pada sasaran " Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan", dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan ditetapkan target sebesar 88,5 realisasi sebesar 85,09 capaian 96,14% dengan kategori "berhasil".

Selanjutnya pada sasaran " Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah", dengan indikator kinerja Nilai SAKIP ditetapkan target sebesar 81,75 realisasi sebesar 82,76 capaian 101,23% dengan kategori "berhasil".

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, rasio, dan nilai. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, secara umum dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Namun untuk indikator Persentase

sengketa pengusaha pengusaha-pekerja per tahun dihitung dengan rumus bahwa semakin rendah realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2018	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	-	-	64,36				-	99,01 %			
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	-	11,53 %	0,00%				320 %	0,00%			
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	-	-	90,39 %					96,67 %			
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	-	26,7	26,7				103 %	89%			
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	-	88	85,09 %				103 %	96,14 %			
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	-	82,76					101,23 %			

Pengukuran kinerja dari tahun 2018 – 2023 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

a. Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal.
   1) **Indikator kinerja 1** : Rasio daya serap tenaga kerja. Realisasi tahun 2020 sebesar 64,36 dengan capaian 99,01%, sedangkan tahun 2019 belum ditetapkan indikator tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut belum bisa dibandingkan.
   2) **Indikator kinerja 2** : Persentase peningkatan nilai investasi daerah. Realisasi tahun 2019 sebesar 11,53% dengan capaian 320%, realisasi tahun 2020 sebesar 0,0% dengan capaian 0,00%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi peningkatan karena realisasi nilai investasinya dibawah tahun 2019.

b. Sasaran strategis : Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif.

   Indikator kinerja 3 : Rasio penduduk yang bekerja. Realisasi tahun 2020 sebesar 90,39%, sedangkan tahun 2019 belum ditetapkan indikator tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut belum bisa dibandingkan.

c. Sasaran strategis : Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

   Indikator kinerja 4 : Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik. Realisasi tahun 2019 sebesar 2,67 dengan capaian sebesar 103%, realisasi tahun 2020 sebesar 2,67 dengan capaian sebesar 89%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan capaian kinerja.

d. Sasaran strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

   Indikator kinerja 5 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan. Realisasi tahun 2019 sebesar 88 dengan capaian sebesar 103%, realisasi tahun 2020 sebesar 85,09 dengan

capaian sebesar 96,14%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan realisasi kinerja.

e. Sasaran strategis : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah **Indikator kinerja 6** : Nilai SAKIP. Tahun 2019 belum ditetapkan indikator tersebut, sedangkan untuk tahun 2020 realisasi sebesar 82,76 dengan capaian 101,23%, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut belum bisa dibandingkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada
Target Jangka Menengah Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	73	-	64,36			
		Persentase peningkatan nilai investasi daerah	4,0%	11,53%	0			
2.	Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	94,40%	-	90,39			
3.	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	4,5	2,67	2,67			
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	89	88	85,09			
5.	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,85	-	82,76			

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Tabel 3.4
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/ Standar Nasional lainnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
			2019	2019	2019
1	2	2	4	5	6
	NIHIL				

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, urusan ketenagakerjaan dan penanaman modal menjadi urusan wajib non dasar sehingga Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).

5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2020 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

a. Sasaran strategis 1 :

Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal, rata-rata capaian indikator sebesar 49,51% sehingga tidak tercapai secara maksimal sesuai yang diperjanjikan karena kondisi pandemi *Covid 19* sangat berpengaruh terhadap perekonomian dimana banyak perusahaan yang gulung tikar dan banyaknya tenaga kerja yang terdampak, disamping itu juga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Sehingga beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan Pendidikan dan pelatihan Peningkatan keterampilan/produktivitas dan pemagangan berbasis pengguna di perusahaan.

1) Indikator 1 : Rasio daya serap tenaga kerja. Telah tercapai sebesar 99,01% dari target sebesar 65.
2) Indikator 2 : Persentase peningkatan nilai investasi daerah belum tercapai dari target 3,7% karena nilai investasi baru mencapai 270,018,419,778 (sumber data LKPM) sehingga tidak mengalami peningkatan.

b. Sasaran strategis 2 :

Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif, rata-rata capaian indikator sebesar 96,67% telah tercapai sesuai yang diperjanjikan karena terlaksananya pembinaan stakeholder ketenagakerjaan secara optimal dan penempatan kerja bagi pencari kerja terdaftar melalui beberapa program kegiatan diantaranya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Koordinasi pengusaha dan pekerja melalui rapat LKS Tripartit, Pembahasan UMK, Fasilitasi pekerja terdampak *covid 19* untuk mendapatkan upgrade skill maupun bantuan tunai serta Fasilitasi/mediasi kasus perselisihan hubungan industrial.

1) Indikator 1 : Rasio Penduduk yang bekerja telah tercapai sebesar 96,67% dari target sebesar 93,50%.

c. Sasaran strategis 3 :

Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, rata-rata capaian indikator sebesar 89% belum tercapai secara maksimal sesuai yang diperjanjikan karena untuk realisasi indeks layanan SPBE pada aspek pelayanan publik Kota Malang masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sehingga indeks sementara yang digunakan adalah realisasi tahun 2019. Indikator kinerja ini didukung oleh terlaksananya program kegiatan pengendalian, data dan informasi.

1) Indikator 1 : Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik baru tercapai 89% dari target sebesar 3.

d. Sasaran strategis 4 :

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, rata-rata capaian indikator sebesar 96,14% telah tercapai sesuai yang

diperjanjikan. Indikator kinerja ini didukung oleh terlaksananya program kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan ekonomi, pariwisata, sosial budaya dan pekerjaan umum.

1) Indikator 1 : Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan tercapai 96,14% dari target sebesar 88,50.

e. Sasaran strategis 5 :

Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, rata-rata capaian indikator sebesar 103,31% telah tercapai secara maksimal sesuai yang diperjanjikan Indikator kinerja ini didukung oleh terlaksananya program kegiatan pelayanan kesekretariatan.

1) Indikator 1 : Nilai SAKIP tercapai 101,23% melebihi target yang ditetapkan sebesar 81,75.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.5
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	65%	10,79%	99,01	93,388,859	92,880,359	99,49	99,56
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,7%	0%	0	784,315,000	781,270,000	99,61	0,00
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	93,50%	90,39%	96,67	161,100,000	153,240,625	95,12	101,63
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	3	26,7	89	446,855,000	435,625,000	97,49	91,29
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	88,5	85,09	96,14	1,696,494,800	1,630,601,800	96,12	100,03
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,75	82,76	101,23	2,831,725,560	2,513,802,234	88,77	114,03

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa masih ada beberapa penggunaan anggaran yang tidak efisien dan efektif yang berdasarkan kinerja.

1) Indikator Rasio daya serap tenaga kerja dengan capaian kinerja 99,01% dan capaian anggaran 99,49%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0,54% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 99,56%
2) Indikator Persentase peningkatan nilai investasi daerah dengan capaian kinerja 0% dan capaian anggaran 99,61%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0,39% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 0%.
3) Indikator Rasio Penduduk yang bekerja capaian kinerja 96,67% dan capaian anggaran 95,12%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 4,88% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 101,63%.
4) Indikator Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik dengan capaian kinerja 89,00% dan capaian anggaran 97,49%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 2,51% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 91,29%.
5) Indikator Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan dengan capaian kinerja 96,14% dan capaian anggaran 96,12%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 3,88% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 100,03%.
6) Indikator Nilai SAKIP dengan capaian kinerja 101,23% dan capaian anggaran 88,77%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 11,23% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 114,03%.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel. 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	99,01%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1,00%	0,00%	0,00%	Diusulkan anggaran pelaksanaan pelatihan bagi pencari kerja dan masyarakat
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan kerja	55,00%	100,00%	181,82%	
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	0,00%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah minat investor	20,00%	0,00%	0,00%	Mengoptimalkan promosi dan fasilitasi investasi dengan memanfaatkan peta potensi investasi daerah
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	96,67%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	74,54%	88,29%	118,45%	
				Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	62,00%	28,57%	46,08%	Mengoptimalkan pembinaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks kematangan SPBE pada aspek Pelayanan Publik	89,00%	Program Pengendalian, Data dan Informasi	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	15,00%	15,00%	100,00%	
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	96,14%	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	Persentase penerbitan izin dan non izin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya	90,00%	90,00%	100,00%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana tindak lanjut
			Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum	Persentase penerbitan izin dan non izin pekerjaan umum	75,00%	75,00%	100,00%	
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	101,23%	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00 %	100,00%	100,00%	
				Nilai survey kepuasan internal	88,5	85,09	96,15%	
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85%	85%	100,00%	

Tabel 3.7
Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
Program Pelayanan Kesekretariatan	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100**	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	3 dokumen	3 dokumen	100	
	Nilai survey kepuasan internal	**96,15**	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	8 dokumen	8 dokumen	100	
	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**100**	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	4 dokumen	4 dokumen	100	
			Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	100	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
			Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah ZI	1 dokumen	1 dokumen	100	
			Penyusunan/reviu standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan	2 dokumen	2 dokumen	100	
			Sertifikasi standar mutu manajemen/pelayanan	Jumlah sertifikasi	1 sertifikasi	1 sertifikasi	100	
			Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen	1 dokumen	100	
			Penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)		-	-	-	Diusulkan pada perencanaan tahun mendatang
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	500 m2	500 m2	100	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	40 unit	40 unit	100	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	8 jenis	8 jenis	100	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan internet	12 bulan	12 bulan	100	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	750 m2	750 m2	100	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	83 jenis	83 jenis	100	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	25 jenis	28 jenis	112	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	9 jenis	100	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	120 eks	120 eks	100	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	5.430 kotak	3.474 kotak	64	Merencanakan kegiatan sesuai kebutuhan
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	16 kali	30 kali	188	
			Peringatan/kegiatan insidentil		-	-	-	
			Pengelolaan perpustakaan dan arsip	Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	3.000 berkas	4.290 berkas	143	
			Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	5 jenis	5 jenis	100	
			Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus	Jumlah pakaian pakaian khusus har-hari tertentu	80 stel	80 stel	100	
			Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	60 orang	69 orang	115	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**0**	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan keterampilan dan Produktivitas		-	-	-	Kegiatan dipriorit askan tahun mendatang
			Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang mengikuti Bimtek	30 LPK/ BLKLN	30 LPK/ BLKLN	100	
			Pemagangan Berbasis Pengguna di Perusahaan		-	-	-	Diusulkan pada perencanaan tahun mendatang
Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	**Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan kerja**	**181,82**	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah peserta Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	20 orang	20 orang	100	Kegiatan dilanjutkan tahun mendatang

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**118,45**	Pembinaan Bursa Kerja Khusus		-	-	-	Kegiatan dipriorit askan tahun mendatang
	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	**38,40**	Pembinaan perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia		-	-	-	Diusulkan pada perencanaan tahun mendatang
			Fasilitasi layanan kerja sektor informal		-	-	-	Diusulkan pada perencanaan tahun mendatang
			Pembahasan Usulan UMK Malang dan Survey Kebutuhan Hidup Layak	Jumlah rapat pembahasan rekomendasi UMK	3 dokumen	3 dokumen	100	
			Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR, dan Penanganan Mayday	Jumlah rapat LKS Tripartit dan Pemantauan UMK dan THR dan Penanganan Mayday	5 dokumen	5 dokumen	100	
			Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		-	-	-	Kegiatan dipriorit askan tahun mendatang
			Pembinaan Peraturan Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		-	-	-	Diusulkan pada perencanaan tahun mendatang
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**Persentase peningkatan jumlah minat investor**	**0**	Penyusunan Bahan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah NA dan RanPerda tentang Penanaman Modal & Penyelenggaraan PTSP	3 dokumen	3 dokumen	100	
			Fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha	Jumlah Laporan Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	100	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
			Penyusunan peta potensi investasi	Peta potensi investasi	1 dokumen	1 dokumen	100	
			Promosi investasi	Jumlah jenis promosi investasi	1 jenis	1 jenis	100	
Program Pengendalian, Data dan Informasi	**Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat**	**100**	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal	8 kali	8 kali	100	
			Penyusunan dan pengembangan SIM Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100	
			Pengolahan dan Pemuktahiran data Tenaga Kerja, Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah data yang dikelola	20.000 data	20.000 data	100	
			Penyuluhan Perizinan	Jumlah peserta penyuluhan	500 orang	481 orang	96	
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	**Persentase penerbitan ijin dan non izin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya**	**100**	Peninjauan lapangan perizinan dan non perizinan ekonomi, pariwisata dan sosial budaya	Jumlah Berita Acara Peninjauan	100 dokumen	272 dokumen	272	
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum	**Persentase penerbitan ijin dan non ijin pekerjaan umum**	**100**	Peninjauan lokasi permohonan perizinan dan non perizinan pekerjaan umum	Jumlah Berita Acara Peninjauan	6.000 dokumen	6.636 dokumen	111	
			Pelayanan perizinan dan non perizinan pekerjaan umum	Jumlah perizinan dan non perizinan pekerjaan umum yang terlayani	1.600 izin	8.620 Izin	539	
			Persiapan mall pelayanan eks. Ramayana	Persiapan mall pelayanan eks. Ramayana	1 dokumen	1 dokumen	100	

a. Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran 1 : **Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal.**

Indikator 1 : Rasio daya serap tenaga kerja, dengan target 65,00% telah berhasil terealisasi sebesar 64,36 dengan capaian sebesar 99,01%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Pelatihan dan Produktivitas.

Indikator 2 : Persentase peningkatan nilai investasi daerah, dengan target 3,70% telah terealisasi sebesar 0,00% dengan capaian sebesar 0,00%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Sasaran 2 : **Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif**.

Indikator 1 : Rasio Penduduk yang bekerja, dengan target 93,50% telah berhasil terealisasi sebesar 90,39% dengan capaian sebesar 96,67%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial.

Sasaran 3 : **Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.**

Indikator 1 : Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik, dengan target 3,00 telah berhasil terealisasi sebesar 2,67 dengan capaian sebesar 89%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pengendalian, Data dan Informasi.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Indikator 1 : Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan, dengan target 88,50 telah berhasil terealisasi sebesar 85,09 dengan capaian sebesar 96,14%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

1) Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata, dan Sosial Budaya.
2) Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum.

Sasaran 5 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.

Indikator 1 : Nilai SAKIP, dengan target 81,75 telah berhasil terealisasi sebesar 82,76 dengan capaian sebesar 101,23%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pelayanan Kesekretariatan.

B. REALISASI ANGGARAN.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 93,24% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.8
Realisasi Anggaran
Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1.	**Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal**	**877.703.859**	**874.150.359**	**99,60**
1.1	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**	**69.040.800**	**69.040.800**	**100,00**
1.1.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan keterampilan dan Produktivitas	-	-	0,00
1.1.2	Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	69.040.800	69.040.800	100,00
1.1.3	Pemagangan Berbasis Pengguna di Perusahaan	-	-	0,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1.2	**Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas**	**24.348.059**	**23.839.559**	**97,91**
1.2.1	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	24.348.059	23.839.559	97,91
1.3	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**784.315.000**	**781.270.000**	**99,61**
1.3.1	Penyusunan Bahan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	352.240.000	351.060.000	99,67
1.3.2	Fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha	167.705.000	167.705.000	100,00
1.3.3	Penyusunan peta potensi investasi	197.500.000	197.500.000	100,00
1.3.4	Promosi investasi	66.870.000	65.005.000	97,21
2.	**Sasaran 1 :** **Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif**	**161.100.000**	**153.240.625**	**95,12**
2.1	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial**	**161.100.000**	**153.240.625**	**95,12**
2.1.1	Pembinaan Bursa Kerja Khusus	15.000.000	15.000.000	100,00
2.1.2	Pembinaan perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia	-	-	0,00
2.1.3	Fasilitasi layanan kerja sektor informal	-	-	0,00
2.1.4	Pembahasan Usulan UMK Malang dan Survey Kebutuhan Hidup Layak	75.000.000	71.300.000	95,07
2.1.5	Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR, dan Penanganan Mayday	53.500.000	49.340.625	92,23
2.1.6	Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	17.600.000	17.600.000	100,00
2.1.7	Pembinaan Peraturan Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	-	-	0,00
3.	**Sasaran 3 :** **Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**446.855.000**	**435.625.000**	**97,49**
3.1	**Program Pengendalian, Data dan Informasi**	**446.855.000**	**435.625.000**	**97,49**
2.1.1.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.000.000	42.500.000	85,00
2.1.2.	Penyusunan dan pengembangan SIM Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP	197.810.000	194.790.000	98,47
2.1.3.	Pengolahan dan Pemuktahiran data Tenaga Kerja, Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	50.000.000	49.290.000	98,58
2.1.4.	Penyuluhan Perizinan	149.045.000	149.045.000	100,00
4.	**Sasaran 4 :**	**1.696.494.800**	**1.630.601.800**	**96,12**

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan			
4.1	**Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya**	**140.000.000**	**140.000.000**	**100,00**
4.1.1	Peninjauan lapangan perizinan dan non perizinan ekonomi, pariwisata dan sosial budaya	140.000.000	140.000.000	100,00
4.2	**Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum**	**1.556.494.800**	**1.490.601.800**	**95,77**
4.2.1	Peninjauan lokasi permohonan perizinan dan non perizinan pekerjaan umum	600.000	-	0,00
4.2.2	Pelayanan perizinan dan non perizinan pekerjaan umum	1.356.574.800	1.291.621.800	95,21
4.2.3	Persiapan mall pelayanan eks. Ramayana	199.320.000	198.980.000	99,83
5.	**Sasaran 5 : Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**	**2.831.725.560**	**2.513.802.234**	**88,77**
5.1	**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**2.831.725.560**	**2.513.802.234**	**88,77**
5.1.1	Penatausahaan barang milik daerah	31.300.000	29.300.000	93,61
5.1.2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3.792.000	3.792.000	100,00
5.1.3	Penyusunan laporan keuangan	99.000.000	98.381.700	99,38
5.1.4	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	5.000.000	5.000.000	100,00
5.1.5	Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	5.000.000	5.000.000	100,00
5.1.6	Penyusunan/reviu standar pelayanan	63.846.000	60.079.400	94,10
5.1.7	Sertifikasi standar mutu manajemen/pelayanan	86.295.000	85.295.000	98,84
5.1.8	Penyusunan Renja/RKT	27.012.000	27.012.000	100,00
5.1.9	Penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	-	-	0,00
5.1.10	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	123.582.360	117.542.000	95,11
5.1.11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	410.458.300	314.359.025	76,59
5.1.12	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	50.200.000	50.100.000	99,80
5.1.13	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	135.000.000	108.893.151	80,66
5.1.14	Penyediaan jasa kebersihan kantor	193.524.000	190.406.800	98,39
5.1.15	Penyediaan alat tulis kantor	198.377.500	192.588.500	97,08
5.1.16	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	260.260.000	233.019.400	89,53
5.1.17	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27.130.000	26.520.000	97,75

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
5.1.18	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	51.845.000	51.317.000	98,98
5.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	198.670.000	102.814.000	51,75
5.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	88.835.400	64.232.158	72,30
5.1.21	Peringatan/kegiatan insidentil	-	-	0,00
5.1.22	Pengelolaan perpustakaan dan arsip	109.382.000	106.117.500	97,02
5.1.23	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	441.806.000	420.622.600	95,21
5.1.24	Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus	43.500.000	43.500.000	100,00
5.1.25	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	177.910.000	177.910.000	100,00
	TOTAL ANGGARAN	**6.013.879.219**	**5.607.420.018**	**93,24**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis dan Perjanjian Kinerja sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang memiliki kategori pencapaian "Cukup berhasil" dengan rata-rata pencapaian sebesar 80,34%, dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja program dan sasarannya. Sedangkan hasil capaian kinerja keuangan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 93,24%.

Untuk menindaklanjuti berbagai realisasi capaian dalam tahun 2020 dan dalam upaya untuk segera mungkin dapat mengeliminasikan permasalahan yang dihadapi maka diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh aparatur dan unsur masyarakat dalam upaya peningkatan pendayagunaan sumberdaya secara optimal sesuai dengan fungsi dan manfaatnya agar memperoleh capaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dalam hal perencanaan anggaran diupayakan untuk lebih optimal dan berbasis kinerja. Disamping itu, perlu adanya inovasi langkah-langkah kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pencapaian sasaran terwujudnya pelayanan Ketenagakerjaan, Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang adil, terukur, berkualitas dan akuntabel. Langkah kebijakan selanjutnya yang perlu diprioritaskan adalah meningkatkan penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk membentuk Tim Teknis dan Tim Pengawasan

yang nantinya bertugas pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Sehingga nantinya memudahkan dan mempercepat didalam pelayanan perizinan kepada masyarakat tanpa ada rekomendasi lagi dari Dinas teknis terkait.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perijinan dan non perijinan yang akuntabel		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		65.94					72	
			Predikat WBK							75	
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	38,73%	63,91	63,91	65	67	70	73	73
			Persentase peningkatan nilai investasi daerah			3,6 %	3,7 %	3,8 %	3,9 %	4,0 %	4,0 %
		Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja		93,21%	93,21%	93,50%	93,80%	94,10%	94,40%	94,40%
		Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik			2.5	3	3.5	3.8	4.5	4.5
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan		87	85	88.5	88.8	89	89	89
		Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	79,66	81,65	81,65	81,75	81,76	81,80	81,85	81,85

PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI
Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 2 Januari 2020

WALIKOTA MALANG,	**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
Drs. H. SUTIAJI	**ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT** Pembina Utama Muda NIP. 19730425 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MALANG

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	2		3	4
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang kompeten dan Nilai Penanaman Modal	1	- Rasio Daya Serap Tenaga Kerja - Persentase Peningkatan Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah.	65% 3,7 %
2	Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	2	Rasio penduduk yang bekerja.	93,50%
3	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	Indeks Layanan SPBE pada aspek Pelayanan Publik.	3
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan dan Non Perizinan.	88.5
5	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	5	Nilai SAKIP.	81,75

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Pelayanan Kesekretariatan	Rp	2,268,646,800.00	Pendapatan Lain Lain
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp	327,175,000.00	DID
3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Rp	250,000,000.00	DBH CUKAI
4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas	Rp	450,000,000.00	DBH CUKAI
5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial	Rp	904,357,200.00	DID
6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	821,715,000.00	Pendapatan Lain-Lain dan DID
7. Program Pengendalian, Data dan Informasi	Rp	424,380,000.00	DID
8. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	Rp	72,280,000.00	DID
9 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum	Rp	757,766,000.00	Pendapatan Lain-Lain dan DID

Malang, 2 Januari 2020

WALIKOTA MALANG,

Drs. H. SUTIAJI

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004

PEMERINTAH KOTA MALANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI
Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 25 September 2020

WALIKOTA MALANG,	**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
Drs. H. SUTIAJI	**ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT** Pembina Utama Muda NIP. 19730425 199803 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MALANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang kompeten dan Nilai Penanaman Modal	1. - Rasio Daya Serap Tenaga Kerja - Persentase Peningkatan Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah	65 3,7 %
2.	Meningkatnya Penempatan Kerja dan dan Hubungan Industrial yang kondusif	2. Rasio penduduk yang bekerja.	93,50%
3.	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3. Indeks Layanan SPBE pada aspek Pelayanan Publik.	3
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan dan Non Perizinan.	88,5
5.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	5. Nilai SAKIP.	80,1

	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	Rp	2.831.725.560,00	Pendapatan Lain Lain
2.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp	69.040.800,00	DID
3.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Rp	-	DBH CUKAI
4.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas	Rp	24.348.059,00	DBH CUKAI
5.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial	Rp	161.100.000,00	DID
6.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	784.315.000,00	Pendapatan Lain-Lain dan DID
7.	Program Pengendalian, Data dan Informasi	Rp	446.855.000,00	DID
8.	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	Rp	140.000.000,00	DID
9	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum	Rp	1.556.494.800,00	Pendapatan Lain-Lain dan DID

Malang, 25 September 2020

WALIKOTA MALANG,

Drs. H. SUTIAJI

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004

PENGUKURAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG
TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Kinerja Tahun 2020							
				Tribulan I		Tribulan II		Tribulan III		Tribulan IV	
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)	
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	65	84,05	129,31	84,05	129,31	84,05	129,31	64,36	99,01
		Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,70%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
2.	Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	93,50%	93,96%	100,49	93,96%	100,49	93,96%	100,49	90,39%	96,67
3.	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks kematangan SPBE pada aspek Pelayanan Publik	3,00	2,67	89,00	2,67	89,00	2,67	89,00	2,67	89,00
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	88,50	-	0,00	82,19	92,87	82,19	92,87	85,09	96,14
5.	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	101,23	82,76	101,23

Malang, Februari 2021
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004